

REVITALISASI KELOMPOK TANI SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN ERA GLOBALISASI

(Revitalization of Farmers Group as Agricultural Extension Media in Globalization Era)

Sunarru Samsi Hariadi

ABSTRACT

Since government decentralized in 1999, extension workers became local government official. In many districts, local government was not ready, so that agricultural extension and their institutions could not play their roles normally. Farmers groups could not be guided by extension workers effectively. Another hand, globalization era would increase competition of agricultural product sale, and farmers were not ready to do it. For answering about agricultural development in globalization era, farmers groups as agricultural extension media have to be improved, agricultural extension have to emphasize product quality and business activities, so that farmers groups can be success as learning forum, medium for cooperative actions, unit of production, and business unit.

Key words: farmers group, agricultural extension, globalization.

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan wewenang yang dimiliki, Pemda dapat secara optimal memanfaatkan seluruh sumberdaya penyuluh pertanian yang tersedia, dalam rangka membangun sumberdaya manusia pertanian (petani) yang berkarakter, profesional, berjiwa wirausaha, disiplin, dan memiliki etos kerja serta dedikasi yang tinggi, sehingga tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian daerah, yang berdampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Era otonomi daerah, yang seiring dengan globalisasi, memberikan dampak terjadinya liberalisasi perdagangan (termasuk hasil pertanian), perkembangan IPTEK yang amat cepat, dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi menyebabkan semakin mudahnya keluar masuk arus informasi dan inovasi antar negara. Ada segi positif globalisasi dan liberalisasi perdagangan, yakni adanya peluang pasar, peluang usaha dan peluang kerja yang banyak, baik domestik regional maupun global, sementara itu derasnya arus informasi dan inovasi harus ditangkap dan dimanfaatkan guna pengembangan kuantitas dan kualitas hasil serta agribisnis. Namun ada segi negatifnya, yakni ketika petani tidak mampu memanfaatkan peluang pasar serta informasi inovasi pertanian.

Sejak otonomi daerah yang terjadi tahun 1999, penyuluh pertanian tidak lagi menjadi pegawai pemerintah pusat tetapi menjadi pegawai pemerintah daerah (pemda). Di beberapa daerah, pemda belum siap sehingga menyebabkan penyuluhan pertanian dan lembaga penyuluhan tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Dana pemda yang terbatas, atau kurang dialokasikan untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian menyebabkan tersendatnya aktivitas penyuluhan, bahkan terjadi pengurangan personil penyuluh pertanian, kelompok-kelompok tani yang sudah ada kurang terbina, yang selanjutnya para petani menjadi jauh ketinggalan teknologi dan informasi. Sementara itu, sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani kecil berjiwa "*peasant*" yang memiliki prinsip usaha "*risk minimization*" (meminimalkan resiko) (Scott, 1983) dan bukan petani berlahan luas berjiwa "*farmer*": yang berprinsip "*profit maximization*" (memaksimalkan keuntungan) (Mosher, 1984), dengan demikian banyak petani yang lemah dalam daya saing perdagangan bebas di era globalisasi ini. Tulisan ini akan mengungkap pentingnya pengembangan kelompok-kelompok tani di era globalisasi ini, yang sejak era otonomi daerah (1999) pembinaan kelompok tani kurang diperhatikan, berdasarkan penelitian di kabupaten

Gunungkidul penulis mencoba menawarkan metode pembinaan kelompok yang merupakan basis media penyuluhan pertanian.

IDENTIFIKASI PROBLEM PERTANIAN DALAM ERA GLOBALISASI

Di era otonomi daerah yang searah dengan globalisasi, dapat dicatat beberapa problema pertanian, antara lain:

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Globalisasi memperlancar perdagangan hasil pertanian dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan sebaliknya. Membanjirnya hasil pertanian luar negeri masuk ke Indonesia seperti buah-buahan, pangan, dsb menjadi pesaing berat bagi produk dalam negeri, ketika produk pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani terganggu, lahan pertanian yang subur seringkali dijual ketika ada permintaan yang tinggi.

Departemen Pertanian RI memperkirakan, dalam kurun waktu tiga tahun (1999 – 2001) sebanyak 700 ribu hektar lahan sawah yang masih produktif mengalami peralihan fungsi menjadi lahan non pertanian. Lahan pertanian yang masih produktif tersebut banyak dimanfaatkan untuk pembangunan industri, jalan raya, serta pembangunan perumahan. Menurut Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan,

beralihnya fungsi lahan sawah menjadi non pertanian mengancam perolehan produksi padi secara nasional. Pada tahun 1999-2001, terjadi perubahan lahan sawah di berbagai tempat sebagai berikut ini: di Sumatera 235.384 Ha (11,15%), Jawa 167.150 Ha (5,01 %), NTT-Bali 13.789 Ha (3,34 %), Kalimantan 195.030 Ha (10,59 %), Sulawesi 148.657 Ha (15,86 %), dan Maluku-Papua 6.004 Ha (6,39 %) (Anonim. 2004.a).

Harga Hasil Pertanian

Harga hasil pertanian seringkali berfluktuasi, ketika hasil panen melimpah harga menurun, sedangkan bila hasil panen berkurang harga naik. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi tentang *supply* dan *demand*, teori Cobweb juga menjelaskan demikian. Di satu sisi, harga hasil pertanian yang tinggi menguntungkan petani, tetapi bagi konsumen seringkali meresahkan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah menetapkan *floor price* (harga terendah) dan *ceiling price* (harga tertinggi) terutama bagi hasil pertanian yang vital seperti beras. Dengan demikian, petani yang bercocok tanam padi akan sulit mendapatkan *profit* (keuntungan) yang tinggi, terlebih lagi apabila sarana produksi seperti pupuk tidak disubsidi. Hasil pertanian yang lain seperti sayuran, buah-buahan, serta hasil ternak dan perikanan seringkali terkendala

faktor pemasaran. Petani belum mampu memanfaatkan peluang pasar, sehingga ketika produksi berlimpah harga menurun dan petani merugi, hal ini semakin terasa bagi petani ketika hasil pertanian luar negeri masuk ke Indonesia, sebagai akibat era globalisasi. Sementara itu penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian untuk memberdayakan petani seringkali masih menekankan peningkatan produksi dan belum banyak menyentuh aspek pemasarannya, sehingga petani (*peasant*) belum mampu menguasai pasar. Hal ini dipertajam ketika petani (*peasant*) masih suka menggunakan sarana produksi kimiawi (pestisida kimiawi, pupuk kimiawi, dsb) karena takut gagal panen, dan hal ini menyebabkan hasil pertanian terhambat bahkan tidak laku ketika akan dipasarkan keluar negeri. Ketika hasil pertanian tidak dapat dipasarkan ke luar negeri, mau tidak mau harus dipasarkan ke dalam negeri dengan harga yang rendah.

Produksi Pertanian

Dua puluh tahun yang lampau pemberdayaan petani melalui kegiatan penyuluhan pertanian telah berhasil meningkatkan produksi pertanian terutama beras, sehingga Indonesia mampu swasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian belum banyak menyentuh aspek pemasaran, sehingga produksi melimpah

namun petani tidak memperoleh banyak keuntungan, baru pada tahun 1996-an didirikan BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) yang juga menangani aspek agribisnis, tetapi di era otonomi daerah (1999-an) lembaga BIPP banyak yang tidak berfungsi karena kebijakan daerah yang berbeda-beda, bahkan lembaga penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten juga bervariasi sesuai selera daerah, penyuluhan pertanian seringkali kurang berkembang karena terbatasnya dana pemda (dahulu pemerintah pusat mendukung dana). Sub sektor pertanian yang lain seperti peternakan, perikanan, perkebun rakyat juga keadaannya relatif sama, mampu meningkatkan produksi tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan karena kendala pasar, karena penyuluh yang berperan memberdayakan petani jumlahnya terbatas dan belum banyak menyentuh aspek agribisnis.

Peraturan Perdagangan

Hambatan yang sering terjadi di era globalisasi ini, ketika hasil pertanian akan diekspor ke luar negeri, kandungan kimiawi terutama pestisida harus memenuhi standar tertentu. Lemahnya penyuluhan pertanian era otonomi daerah menyebabkan petani (*peasant*) seringkali masih pestisida *minded*, karena selama revolusi hijau penyuluhan gencar dilaksanakan guna meningkatkan produksi pertanian

sehingga petani terbiasa menggunakan pestisida, dengan demikian produk hasil pertanian yang banyak mengandung pestisida tidak laku diekspor.

Ternyata, beberapa buah-buahan dan sayuran dalam negeri masih memiliki residu pestisida meskipun berada dibawah Batas Maksimum Residu (BMR). Uji petik di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman untuk beberapa komoditas menunjukkan bahwa: jeruk (Jawa Timur, Sumut) dan anggur (Bali) terdeteksi pestisida tetapi nilai dibawah BMR, sementara itu apel (Jawa Timur) jeruk (Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah) tidak terdeteksi pestisida. Demikian pula, bawang merah (Jawa Timur) dan tomat (Jawa Barat) terdeteksi pestisida tetapi berada dibawah nilai BMR. Dibandingkan dengan buah-buahan impor yang dianalisis seperti: peer (Korea, Xiangi), anggur (Amerika, dan Australia), apel (RRC dan Amerika), jeruk (Australia), ternyata untuk 14 jenis pestisida tidak terdeteksi adanya pestisida (Anonim. 2004.b).

Pengendalian Hama dan Penyebab Penyakit

Pengendalian hama dan penyebab penyakit dilakukan guna mempertahankan produksi agar tetap tinggi. Dewasa ini dikembangkan penggunaan pestisida non kimiawi, agar tidak merusak lingkungan dan hasil pertanian. Namun demikian,

yang tidak kalah pentingnya adalah usaha preventif yakni menjaga agar tidak kemasukan hama dan penyebab penyakit dari luar daerah, inilah peran karantina. Seringkali, peran karantina ini lemah sehingga hama ataupun penyebab penyakit dari luar daerah, bahkan dari luar negeri masuk dan menyerang wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.

Kelompok-Kelompok Tani

Pada tahun 1993, Martaatmadja (1993) mencatat bahwa di Indonesia kelompok-kelompok tani yang aktif hanya 20 persen. BIPP Gunungkidul pada tahun 1999 mencatat kelompok tani yang termasuk aktif atau berhasil (Kelompok Tani Utama) hanya sekitar 10,46 persen. Padahal, kelompok tani ini merupakan ujung tombak pembangunan pertanian Indonesia, karena kelompok tani juga sebagai wadah/tempat belajar, bekerjasama, berproduksi, dan melakukan usaha/bisnis. Penelitian di Kabupaten Gunungkidul (Hariadi, 2004) menunjukkan bahwa kelompok tani yang berhasil maju dan berkembang (memiliki usaha bisnis) tidak lebih dari 10 %.

REVITALISASI KELOMPOK TANI

Kelompok tani merupakan kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sum-

berdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana: proses belajar mengajar, bekerjasama, berproduksi, dan usaha/bisnis. (Departemen Pertanian RI. 1997). Sejarah telah mencatat bahwa peran kelompok tani sangat besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian, hal ini tampak dari swasembada beras yang pernah dicapai pada tahun 1984, yang tidak lepas dari peran kelompok tani dalam mensukseskan program bimas, insus, supra insus. Namun demikian, sejak era otonomi daerah pada tahun 1999 banyak perubahan kelembagaan penyuluhan termasuk pengurangan tenaga penyuluh, yang mengakibatkan terlantarnya pembinaan kelompok tani. Dengan demikian, dalam paradigma baru penyuluhan pertanian yang menekankan kelompok tani sebagai organisasi yang tangguh di bidang ekonomi dan sosial, diperlukan revitalisasi kelompok-kelompok tani.

Hariadi (2004) telah melakukan penelitian kelompok tani di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan metode survei, di kabupaten tersebut terdapat 1446 kelompok tani, dengan perincian: 24 kelompok tani kelas pemula, 636 kelas lanjut, 645 kelas madya, dan 141 kelas utama. Sampel kelompok tani diambil

dengan menggunakan metode *Stratified Random Sampling*, dan diperoleh sampel sebanyak 90 kelompok tani dengan perincian: 5 kelompok tani kelas pemula, 32 kelas lanjut, 37 kelas madya, dan 16 kelas utama. Hasil penelitian Hariadi (2004) menunjukkan sebagai berikut ;

Profil Anggota Kelompok

Di daerah penelitian, kelompok tani berdiri antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1995, terdiri atas kelompok tani kelas pemula, lanjut, madya, dan utama. Jumlah anggota kelompok tani bervariasi antara 20 orang s/d 100 orang, rata-rata perkelompok beranggotakan 35 orang. Umur petani anggota kelompok bervariasi antara 22 tahun s/d 75 tahun, dengan rata-rata 46,14 tahun. Sedangkan pendidikan petani juga bervariasi, ada 38,22 persen pendidikan SD, 33,33 persen berpendidikan SLTP, 19,11 persen berpendidikan SMU, dan 9,34 persen berpendidikan Diploma/Perguruan Tinggi.

Selain sebagai petani, anggota kelompok umumnya memiliki pekerjaan sampingan, antara lain bekerja sebagai buruh bangunan, tukang kayu, pengrajin, pedagang, penjahit, sopir, dan sebagainya. Pemilikan lahan pertanian relatif kecil, pemilikan sawah rata-rata 0,30 hektar, tegal 0,40 hektar, pekarangan 0,16 hektar. Produktivitas lahan pertanian berkisar antara 48 – 60 kuintal setara gabah per

hektar per tahun. Lahan pertanian berupa sawah dan tegal biasanya ditanami padi, jagung, kacang tanah, kedele, ubi kayu, sayuran, yang ditanam secara tumpang sari.

Ditinjau menurut stratifikasi kelompok, rata-rata produktivitas lahan pertanian pada kelompok tani pemula sebesar 48,43 kuintal setara gabah per hektar per tahun, pada kelompok tani kelas lanjut sebesar 50,47 kuintal setara gabah per hektar per tahun, pada kelompok tani kelas madya sebesar 57,95 kuintal setara gabah per hektar per tahun, dan pada kelompok kelas utama sebesar 60,02 kuintal setara gabah per hektar per tahun.

Keberhasilan Kelompok sebagai Unit: Belajar, Berjasama, Produksi, dan Bisnis

Keberhasilan kelompok tani diukur menggunakan skoring dengan metode skala Likert berdistribusi normal, alat ukur atau kuesioner terlebih dahulu diuji tentang validitas, reliabilitas, serta konstruksinya. Skor keberhasilan kelompok sebagai unit belajar berkisar 0 – 180, unit kerjasama berkisar 0 – 285, unit produksi berkisar 0 – 160, dan unit bisnis berkisar 0 – 200.

Dari tabel 1 tampak bahwa kelompok tani utama berhasil dalam usaha bisnis sebesar 55,55 %, kelompok tani madya berhasil 52,50 %, sedangkan kelompok

tani kelas lanjut dan pemula keberhasilannya kurang dari 50 %. Semakin tinggi kelas kelompok, keberhasilan kegiatan bisnis semakin tinggi. Pada kelas terendah

yakni pemula, usaha bisnis hanya simpan pinjam. Pada kelompok tani kelas lanjut usahanya bisnis meliputi simpan pinjam, pengadaan saprodi, kerja kelompok, perse-

Tabel 1. Rata-rata nilai skor dan persentase keberhasilan berbagai unit pada berbagai strata kelompok tani

Keberhasilan pada unit	Pemula		Lanjut		Madya		Utama	
	Skor	% berhasil	Skor	% berhasil	Skor	% berhasil	Skor	% berhasil
Belajar	117	65,00	126	70,00	127	70,55	132	73,33
Kerjasama	140	49,12	146	51,22	148	51,92	155	54,38
Produksi	86	53,75	90	56,25	93,37	105	65,62	
Bisnis	79	39,50	99	49,50	105	52,50	111	55,50

Sumber: Hariadi, 2004.

waan alat non pertanian, perbenihan. Kelas kelompok yang lebih tinggi lagi yakni madya, usaha bisnis meliputi simpan pinjam, pengadaan saprodi, kerja kelompok, persewaan alat non pertanian, perbenihan, persewaan alat pertanian, dan warung kelompok/koperasi. Selanjutnya, pada kelompok tani kelas utama usaha bisnis meliputi simpan pinjam, pengadaan saprodi, kerja kelompok, persewaan alat non pertanian, perbenihan, persewaan alat pertanian, warung/koperasi, peternakan milik kelompok, dan mitra kerja dengan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani yang berkembang dalam usaha bisnis signifikan dipengaruhi oleh faktor “*self efficacy*” (keyakinan diri mampu berhasil), menurut Bandura (1997) *self efficacy*

memberi semangat kerja, keuletan, dan bekerja keras sehingga berhasil mencapai tujuan meski tujuan tersebut (bisnis) mengandung resiko rugi.

Keterkaitan Kegiatan Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis

Kelompok tani berfungsi menjalankan empat kegiatan, yakni unit belajar, kerjasama, produksi, dan usaha. Diawali dengan aktivitas penyuluh pertanian yang memberikan penyuluhan pada kelompok tani, disinilah terjadi proses belajar mengajar. Dari proses belajar mengajar, kelompok kemudian melakukan kerja sama yang biasanya dalam hal penyediaan saprodi, pemasaran bersama, dan sebagainya. Kerjasama tersebut menghasilkan produksi, yang meningkatkan produktivitas usaha tani. Dengan meningkat-

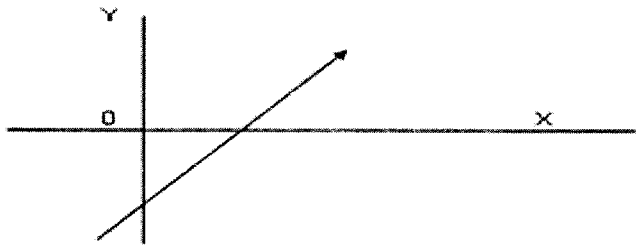
nya produksi dan produktivitas serta pendapatan, mendorong kelompok tani mengembangkan usaha bisnis. Dari hasil penelitian diperoleh rumusan fungsi regresi sbb:

1. Keberhasilan kelompok tani sebagai unit kerjasama adalah fungsi keberhasilan

kelompok sebagai unit belajar, dengan rumus ekonometrika sbb:

$$Y = - 5,933 + 1,218 X \quad F \text{ hitung} = 58,532, \quad t \text{ hitung} = 7,651 \quad (\text{tingkat kesalahan } 0 \%)$$

Dari gambar 1, tampak bahwa semakin besar tingkat keberhasilan kegiatan unit



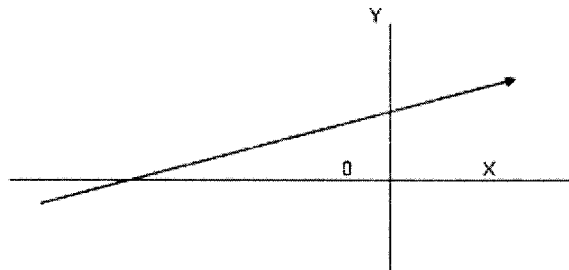
Gambar 1. Hubungan antara keberhasilan unit belajar (X) dengan keberhasilan Unit kerjasama (Y).

belajar akan meningkatkan keberhasilan kegiatan unit kerjasama. Manakala nilai $X = 0$ yang berarti tidak ada keberhasilan kegiatan unit belajar, maka juga tidak akan terjadi keberhasilan kegiatan unit kerjasama. Dengan demikian, proses belajar mengajar yakni penyuluhan lewat kelompok tani sangat penting guna mengembangkan kerjasama anggota kelompok.

2. Keberhasilan kelompok tani sebagai unit produksi adalah fungsi dari keberhasilan kelompok sebagai unit kerjasama, dengan rumus ekonometrika sbb:

$$Y = 49,903 + 0,356 X \quad F \text{ hitung} = 82,485, \quad t \text{ hitung} = 9,082 \quad (\text{tingkat kesalahan } 0 \%)$$

Dari gambar 2, tampak bahwa semakin besar tingkat keberhasilan kegiatan kerjasama akan meningkatkan keberhasilan



Gambar 2. Hubungan antara keberhasilan unit kerjasama (X) dengan keberhasilan unit produksi (Y).

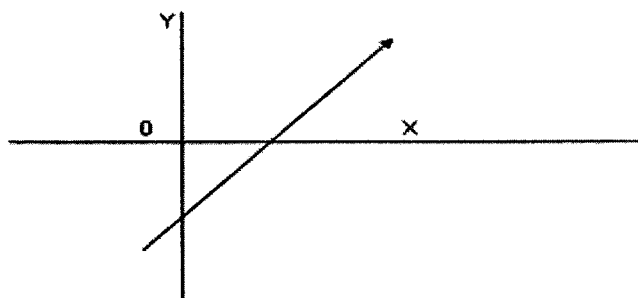
produksi pertanian. Namun demikian, kegiatan kerjasama dalam kelompok tani bukanlah satu-satunya penyebab keberhasilan peningkatan produksi, hal ini tampak dari gambar 2 bahwa ketika tidak ada kegiatan kerjasama atau $X=0$, keberhasilan produksi menunjukkan angka tertentu, yang kemudian bila kegiatan kerjasama (X) semakin besar maka keberhasilan produksi juga semakin tinggi.

3. Keberhasilan kelompok tani sebagai unit bisnis adalah fungsi dari keberhasilan kelompok sebagai unit produksi, dengan rumus ekonometrika sbb:

$$Y = - 5,799 + 1,055 X$$

F hitung = 152,350, t hitung = 12,343 (tingkat kesalahan 0 %).

Dari gambar 3, tampak bahwa semakin besar tingkat keberhasilan kegiatan kerjasama akan meningkatkan keberhasilan kegiatan unit bisnis. Manakala nilai



Gambar 3. Hubungan antara keberhasilan unit produksi (X) dengan keberhasilan unit bisnis (Y).

$X=0$ yang berarti tidak ada keberhasilan kegiatan produksi, maka juga tidak akan terjadi keberhasilan kegiatan unit bisnis. Dengan demikian, keberhasilan memproduksi hasil pertanian lewat kegiatan kelompok tani sangat penting perannya guna mengembangkan kegiatan bisnis anggota maupun kelompok.

4. Temuan untuk revitalisasi kelompok tani

Kelompok tani dapat berhasil melakukan kegiatan bisnis dipengaruhi

oleh keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pertanian, ini disebabkan keberhasilan produksi memberikan tambahan pendapatan yang kemudian pendapatan tersebut dikembangkan untuk kegiatan bisnis anggota kelompok, ataupun mengembangkan bisnis kelompok. Namun demikian, keberhasilan meningkatkan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh peningkatan kerjasama kelompok. Keberhasilan kerjasama anggota kelompok juga sa-

ngat dipengaruhi oleh keberhasilan kegiatan belajar dalam kelompok, dengan demikian apabila dikaji sebab-akibat, maka keberhasilan kegiatan belajar didalam kelompok (penyuluhan lewat kelompok) merupakan fundamental keberhasilan dalam kegiatan bisnis.

Penyuluhan lewat kelompok tani merupakan dasar untuk pengembangan kelompok tani dalam kegiatan bisnis, terlebih berkakunya perdagangan bebas di era globalisasi ini. Penyuluhan lewat kelompok tani perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

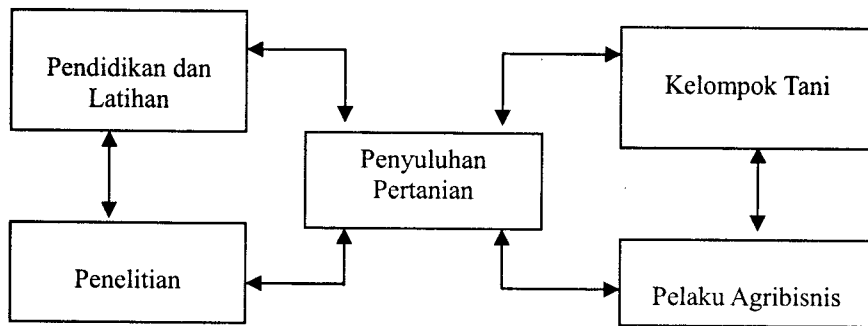
KESIMPULAN

Di era otonomi daerah bersamaan dengan globalisasi, kinerja penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem perlu dikembangkan, yakni dengan mene-

kankan keutamaan atau meningkatkan peran kelompok-kelompok tani sebagai media penyuluhan guna pemberdayaan SDM pertanian. Kinerja sub sistem dalam sistem penyuluhan pertanian ditingkatkan dan sinergi antar subsistem.

Perubahan prinsip petani dari usaha tani yang “meminimalkan resiko”, menjadi berprinsip usaha tani yang “memaksimalkan keuntungan” atau dari sifat “*peasant*” menjadi “*farmer*” merupakan sesuatu yang perlu ditekankan ketika melakukan pembinaan kelompok tani. *Farmer* merupakan petani “pengusaha” yang memiliki jiwa bisnis, berani menanggung resiko, memaksimalkan keuntungan, selalu berusaha mencari peluang pasar, karena itu petani/farmer perlu memiliki “*self efficacy*” yang tinggi

Menurut Bandura (1997) ada berbagai cara untuk meningkatkan “*self efficacy*”,



Gambar 4. Sistem Penyuluhan dalam Pembinaan Kelompok Tani

peningkatan *self efficacy* dapat diterapkan ketika melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada kelompok tani. Upaya pe-

ningkatan “*self efficacy*” (keyakinan diri mampu berhasil) pada petani melalui kelompok tani dapat dilakukan melalui

cara:

1. Meningkatkan pengalaman petani yang secara langsung memberikan tambahan kemampuan, misalnya dengan cara mendekati dan melibatkan petani/ kelompok tani dengan pelaku bisnis, metode yang dilakukan adalah petani/ kelompok tani magang pada kelompok tani yang telah berhasil dalam usaha bisnis,
2. Meningkatkan pengalaman petani/ kelompok tani melalui melihat langsung dari pengalaman petani/ kelompok tani lain yang berhasil dalam bisnis (*social learning*), misalnya dengan metode kegiatan studi banding kepada kelompok lain yang berhasil dalam bisnis,
3. Persuasi verbal, persuasi akan lebih efektif manakala yang melakukan adalah petani/ kelompok tani yang sudah berhasil dalam bisnis, disini menggunakan metode penyuluhan “petani menyuluh kepada petani” atau “petani belajar kepada petani”

DAFTAR PUSTAKA.

- Sinar Tani No.3055. 2004.a. *Tujuh Ratus Ribu Hektar Lahan Sawah Beralih Fungsi*.
- Sinar Tani N.3056. 2004.b. *Residu Pestisida pada Buah dan Sayuran*.
- Bandura. 1997. *Self Efficacy: The Exercise of Control*New York. WH Freeman and Company.
- Departemen Pertanian RI. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan*. Jakarta. Pusat Penyuluhan Pertanian.
- Hariadi, Sunarru Samsi. 2004. *Kajian Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Usaha*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (Disertasi).
- Martaatmadja. 1993. *Agricultural Extension System in Indonesia*. Jakarta. Ministry of Agriculture Republic of Indonesia.
- Mosher, AT. 1984. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta. CV. Yasaguna.
- Scott, JC. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta. LP3ES.